

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Fakhry. dkk. 2023. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- C., Jeffri Arlinandes. Rofi Wahanisa, Ade Kosasih. 2022. *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Indart, Maria Farida. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisus.
- J., Teuku Saiful B. 2022. *Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara)*. Sleman: Deepublish.
- Juliardi, Budi., dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Gita Lentera.
- Laritmas, Selfianus & Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mastorat. 2021. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Qamar, Nurul & Rezah, Farah Syah. 2020. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: Social Politic Genius.

- Redi, Ahmad. 2021. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S., Adhi Putra. 2021. *Problematika Hukum di Indonesia, Catatan Kritis atas Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Indramayu: Adanu Abimata.
- Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryono, Hassan. 2005. *Hukum Kenegaraan dan Perundang-Undangan: Perspektif Sosiologis-Normatif dalam Teori dan Praktik*. Surakarta: UNS Press.
- Swantoro, Herri. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenada Media.
- Syamsuddin, Aziz. 2022. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Sri. dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Tohar Media.

B. Peraturan Perundang –undangan

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838.

C. Jurnal

Adam. 2021. "Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia". *JET: Journal of Education and Teaching*. DOI: <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106>

Elisabet, Sara Indah. 2020. "Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai

- Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, Vol. 1, No. 1, 2020, ISSN: 2722-7316
- Gusti & Masduki. 2022. “Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia”. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Hastuti, Evi. dkk. 2020. “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi”. *Law Review*, Vol. 3, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2/2020.613>
- Nur Kemala Putri, dkk, ‘Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi’ (2024) 1 WATHAN: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 56.
- Rianti. 2018. “Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional”. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 13. DOI: [10.30996/dih.v7i13.252](https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.252)
- Riastri Haryani, ‘Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundangundangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945’ (2017) 6 *Binamulia Hukum* 118.
- Sarvitri, Anne. 2019. “Otonomi Pendidikan Tinggi dan Pembiayaannya: Antar Kemajuan dan Komersialisasi Pendidikan (Tinjauan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)”. *Judika (Jurnal Pendidikan Unsika)*, Vol. 8, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.35706/judika.v8i1.1935>

Soemarwi, Vhera Wheni. 2023. Dampak Disharmoni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25021>

Susetio, Wasis. 2016. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.35706/judika.v8i1.1935>

Surya, Ida & Abdul Wahab. 2023. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>

Tresnadipangga, Bimo. Fokky Fuad. Suartini. 2023. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia”. *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>

C. Skripsi

J., Wahyudi. 2022. Skripsi: *Disharmoni Regulasi Otonomi Perguruan Tinggi di Indoensia*. Universitas Islam Indonesia.

D. LAIN LAIN

Soegiyono. 2015. “*Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*”. <https://Puskkpa.Lapan.Go.Id>.